

SEJARAH DAN PARADIGMA KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Ahmad Saifudin
STAI Darussalam Nganjuk
Email: ahmadsaifudin316@gmail.com

Abstrak: Kurikulum adalah unsur yang sangat penting pada setiap model dan bentuk pendidikan. Kurikulum secara formal sudah diterapkan di sekolah sejak zaman Belanda. Artinya pada saat itu kurikulum juga sudah ada. Pelaksanaan pendidikan pada zaman Belanda punya ciri khas kurikulum tersendiri yang tentu diwarnai dengan misi penjajahan pemerintah Belanda. Demikian juga halnya pada zaman Jepang. Maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pendidikan pada zaman tersebut ialah untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan di Indonesia. Pemerintah Belanda misalnya memanfaatkan penduduk pribumi untuk mengumpulkan dan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin, sedangkan pemerintah Jepang bertujuan untuk membantu mereka memenuhi misinya dalam peperangan di Asia Timur Raya. Pendidikan di Indonesia terus berkembang setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dalam hal ini termasuk perhatian dalam hal kurikulum. Sehubungan dengan hal ini, kurikulum di Indonesia dibagi menjadi dua periode: periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Secara kronologis sejak tahun 1945, keberadaan kurikulum telah mengalami banyak perubahan yaitu dimulai pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013. Keberadaan Pendidikan Islam tetap menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Pendidikan Islam pada zaman ini dituntut mampu meningkatkan pemahaman siswa atau anak didik dalam ilmu agama sekaligus mengamalkan ajaran Islam.

Kata Kunci: **Sejarah, Paradigma Kebijakan Kurikulum Pendidikan**

Pembahasan

Analisis Kebijakan dan Kurikulum Pengertian kebijakan pendidikan

Secara etimologis kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu: *polis* yang artinya kota. Selanjutnya istilah kebijakan mengacu kepada sebuah cara dari semua bagian yang digunakan pemerintahan untuk mengelola semua kegiatan mereka. Seperti yang disampaikan Safarudin bahwa kebijakan berhubungan dengan gagasan serta pengaturan organisasi diartikan dengan pola formal yang biasa digunakan oleh pemerintah dan lembaga dalam mencapai tujuan organisasi.¹

Definisi dari kebijakan sangat banyak dan beragam. Banyak ahli yang mendefinisikan kebijakan sesuai kapasitas mereka masing-masing. Penggunaan istilah kebijakan banyak di sandingkan dengan istilah tujuan atau *goals* keputusan atau *decision, standard*, proposal dan *grand design*. Akan tetapi secara umum kebijakan digunakan pada perilaku pejabat lembaga pemerintah dalam suatu bidang kegiatan yang spesifik.

Pandangan Umar Sidiq yang dikutip dari Solihin Abdul Wahab mengartikan istilah kebijakan kedalam 10 macam yaitu:²

1. Kebijakan diibaratkan sebuah label serta merk dalam suatu bidang aktivitas pemerintah (*policy as a label for a field of activity*).
2. Kebijakan sebagai bentuk pernyataan mengenai tujuan umum serta keadaan tertentu yang diinginkan dalam organisasi (*policy as an expression of general purpose or desired state of affairs*).
3. Kebijakan sebagai bentuk usulan-usulan khusus (*policy as specific proposals*)

¹ Umar Sidiq and M.Pd Wiwin Widyawati, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*, ed. by M.Ag Dr. Ahmad Choirul Rofiq, 1st edn (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019).

² Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: UPT Penerbitan UMM, 2011), hlm. 16.

4. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan pemerintah (*policy as decision of government*).
5. Kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau pengesahan formal (*policy as formal authorization*).
6. Kebijakan sebagai program (*policy as programme*).
7. Kebijakan sebagai keluaran (*policy as output*).
8. Kebijakan sebagai hasil akhir (*policy as outcome*).
9. Kebijakan sebagai bentuk teori dan model (*policy as a theory or model*).
10. Kebijakan sebagai proses (*policy as process*).

Berikut penulis kutipkan beberapa definisi kebijakan menurut para tokoh.³

Menurut pandangan James E. Anderson (1978) : kebijakan adalah perilaku sejumlah aktor baik pejabat atau kelompok, dalam Instansi atau merupakan serangkaian aktor dalam suatu bentuk kegiatan tertentu. Sedangkan menurut PBB (*United Nation*) 1975: kebijakan adalah suatu deklarasi tentang suatu dasar pijakan dalam bertindak, suatu arah dalam menuntun tindakan tertentu, yang didalamnya terdapat program mengenai aktifitas –aktivitas tertentu yang diawali dari sebuah perencanaan.

Menurut pendapat Prof. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt : *a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it*. Dan menurut Carter V. Good (1959) : *Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational faktors, operating within institutionalized adecation as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives*

Menurut Laswell, dkk (Subarsono, 2005) “kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai pada

masyarakat, setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya”⁴

Menurut Nichols bahwa, kebijakan merupakan keputusan yang dipikirkan secara matang serta hati-hati oleh para pengambil keputusan. ⁵ Juga Klein dan Murpy menyebutkan bahwa kebijakan merupakan seperangkat , tujuan, prinsip dan peraturan yang membimbing sesuatu organisasi. kebijakan dengan kata lain mencakup keseluruhan petunjuk dan wewenang organisasi.

Dari berbagai pemikiran para tokoh atas mengenai pendapat mereka tentang pengertian dari kebijakan, bisa dengan mudah ditarik kesimpulan bahwasannya kebijakan merupakan suatu keputusan yang dihasilkan dari perilaku para pengambil keputusan dalam sebuah organisasi atau lembaga mengenai aktifitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana dalam mencapai sebuah tujuan.

Kurikulum pendidikan

Konsep kurikulum Secara etimologis berasal dari kata *curere* yang mengandung arti berlari dan berpacu. Berikut menurut beberapa pendapat beberapa tokoh tentang kurikulum⁶

Oemar Hamalik berpendapat bahwa kurikulum adalah program pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan (sekolah) untuk peserta didik. Hasan Langgulung juga mengatakan yang dikutip dari Al Syaibani mengatakan bahwa kurikulum adalah sekumpulan pengalaman-pengalaman yang

³ Anwar H.Mohammad Emnis, ‘Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia’, *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 03.Januari (2014), 483–96.

⁴ Mufarrihul Hazin and Nur Wedia Devi Rahmawati, ‘Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Studi Histori Dan Regulasi Di Indonesia)’, *Journal EVALUASI*, 5.2 (2021), 293 <<https://doi.org/10.32478/evaluasi.v5i2.745>>.

⁵ Rachmad Sobri, ‘Politik Dan Kebijakan Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Di Indonesia (Analisis Kebijakan PP No 55 Tahun 2007)’, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.01 (2019), 109 <<https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.322>>.

⁶ Ahmad Taufik, ‘Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam’, *EL-Ghiroh*, 17.02 (2019), 81–102 <<https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v17i02.106>>.

didapat dari hasil pendidikan dan pengajaran, yang dipengaruhi oleh perkembangan nilai-nilai budaya, sosial, olahraga, kesenian yang disajikan oleh lembaga pendidikan untuk kemajuan peserta didik baik di dalam lembaga atau diluar lembaga, dengan tujuan untuk merubah tingkah laku sesuai dengan tujuan pendidikan secara menyeluruh di semua aspek.⁷ Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 juga sudah dijelaskan tentang perangkat, perencanaan pengaturan tentang tujuan, isi serta bahan pelajaran dan pedoman penyusunan kurikulum tingkat satuan Pendidikan serta silabusnya pada setiap satuan pendidikan.⁸

Menurut Husain Qurah yang dikutip Irsad, kurikulum diartikan sebagai bentuk manhaj, yang mengandung arti jalan terang, atau jalan yang biasa dilalui oleh manusia pada berbagai aspek dan bidang kehidupan.⁹ sementara dalam pandangan Crow kurikulum diartikan sebuah rancangan dalam pengajaran atau sekumpulan mata pelajaran yang telah disusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam meraih gelar atau mendapatkan ijazah.¹⁰

Menurut Arifin kurikulum adalah seluruh bahan pelajaran yang disajikan dalam rangka kelancaran proses kependidikan yang dikelola oleh institusi Pendidikan. Dan menurut Mac Donald (1965; 3) kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman yang digunakan oleh lembaga pendidikan selama berlangsungnya proses kegiatan belajar-mengajar.

Dari beberapa pendapat para tokoh tersebut mengenai pengertian dari kurikulum maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa

⁷ Yudi ^{Candra} Hermawan, Wikanti Iffah Juliani, and Hendro Widodo, 'Konsep Kurikulum Dan Kurikulum Pendidikan Islam', *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10.1 (2020), 34 <<https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.4720>>.

⁸ Ibid

⁹ Muhammad Irsad, 'Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah (Studi Atas Pemikiran Muhaimin)', 2.1 (2016), 230–68.

¹⁰ Hermawan, Juliani, and Widodo, 69

yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat program pendidikan dan rencana pengaturan pendidikan yang dibuat oleh sebuah institusi pendidikan atau lembaga negara yang digunakan sebagai pedoman bagi sebuah lembaga dalam menjalankan proses belajar mengajar. Sedangkan kebijakan kurikulum adalah keputusan yang diambil oleh pemegang kekuasaan dalam menentukan seperangkat program pendidikan dan rencana pengaturan pendidikan.

Karakteristik kebijakan pendidikan

Kebijakan pendidikan mempunyai karakteristik yang bersifat khusus. Yaitu:¹¹

1. Memiliki tujuan pendidikan secara khusus kebijakan
Pendidikan dan pengajaran memiliki tujuan yang jelas dan terarah, oleh sebab itu diharapkan pendidikan mampu merubah dan membentuk karakter dan jiwa anak menjadi dewasa secara kodrati. Dan dapat berjalan dengan baik, efektif serta efisien diberbagai bidang.
2. Memenuhi aspek legal formal
Tentu saja hal ini wajib adanya agar kebijakan pendidikan diakui secara sah dan berlaku dalam sebuah wilayah. Maka dari itu syarat konstitusional harus bisa dipenuhi sesuai dengan hierarki konstitusi
3. Memiliki konsep operasional
Kebijakan pendidikan harus punya konsep operasional agar mudah untuk diimplementasikan dan bisa berhasil optimal
4. Dibuat oleh yang berwenang
Kebijakan pendidikan merupakan hal yang penting yang nantinya diimplementasikan dan dipakai lembaga-lembaga pendidikan. Oleh karena itu kebijakan ini haruslah disusun oleh para ahli dibidangnya yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dalam hal ini yang berwenang membuat kebijakan tersebut adalah pengelola lembaga pendidikan, administrator pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan

¹¹ Emnis. 487

5. Dapat dievaluasi

Dalam perjalanan implementasinya, sebuah kebijakan tentu saja akan mengalami berbagai masalah dan kendala. Maka dari itu diperlukan sebuah tindakan evaluasi agar kebijakan tersebut bisa diperbaiki dan berjalan lebih optimal di masa mendatang

6. Memiliki sistematika

Kebijakan merupakan sebuah system. Maka dari itu kebijakan harus mempunyai sistematika yang jelas terhadap seluruh aspek yang akan diatur. Sistematika dalam kebijakan tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dengan struktur yang rapuh. sistematika kebijakan hendaknya bersifat efektif dan efisien serta *sustainable*.

Langkah-langkah dalam kebijakan pendidikan

Implementasi kebijakan bermakna pengembangan kriteria khusus dalam praktik bagi pembuatan keputusan yang mencapai maksud kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prakondisi untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi.¹² Apabila keadaan ini dibiarkan begitu saja maka kebijakan kurikulum yang akan diambil menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran. kebijakan harus diambil atas dasar data dan informasi di lapangan.

Kebijakan kurikulum harus melibatkan unsur-unsur terkait, contoh kebijakan kurikulum pendidikan Islam, harus melibatkan orang-orang dari unsur pesantren, para pakar lembaga pendidikan Islam. Maka langkah pertama yang diambil dalam menentukan kebijakan adalah adanya input dari kebutuhan masyarakat. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan masalah-masalah apa saja yang harus diteliti dengan cara melakukan riset dan melakukan eksperimen-eksperimen. Hal ini yang disebut siklus yang saling berhubungan antara kebijakan pendidikan, dengan praktik pendidikan, riset serta eksperimen.

Asesmen dari kebijakan menuntut peran aktif para pendidik tenaga pendidik yang profesional sehingga dari merekalah bisa terbentuk formulai-formulasi hasil kebijakan yang akan di lakukan reset guna mendesiminasikan kebijakan pendidikan atas dasar fakta positif.

Kebijakan dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan secara kolektif yang direalisasikan melalui wewenang pemerintah yang legitimate dalam rangka mendorong, serta menghambat, melarang, mengatur tindakan private (individu atau pada lembaga swasta), dalam memutuskan Kebijakan pendidikan nasional harus memperhatikan akar serta persoalan pendidikan yang ada di tanah air.

Kebijakan privat merupakan tindakan yang telah dilakukan seseorang atau dalam lembaga swasta yang tidak bersifat memaksa kepada individu atau dalam suatu lembaga lain. contoh, keputusan perusahaan swasta dalam menetapkan nilai harga jual sebuah produk yang telah dihasilkan, ini merupakan contoh kebijakan privat.¹³ Pola dan model adopsi pendidikan di luar negeri dan implementasi dalam kebijakan pendidikan nasional bukanlah satu-satunya solusi yang tepat mengatasi permasalahan dunia pendidikan di tanah air.¹⁴

Ada beberapa tingkatan dalam kebijakan pendidikan. indikator dari tingkatan-tingkatan disini adalah tingkatan dimana kebijakan itu susun atau dirumuskan dan diimplementasikan.¹⁵

1. Tingkatan kebijakan nasional

Pada tingkatan ini yang paling berwenang lembaga legislatif dan eksekutif adalah DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengawal Dalam menjalankan roda kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan

¹³<https://www.google.com/search?q=kebijakan+privat&oq=kebijakan+privat&aqs=chrome..69i57j0i51219.1759j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

¹⁴

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/23/kebijakan-pendidikan-nasional-quo-vadis>

¹⁵ Dr. Umar Sidiq and Wiwin Widyawati. 2

¹² Umar Sidiq and Wiwin Widyawati. 22

2. Tingkatan kebijakan umum
Pada tingkatan ini yang berwenang adalah eksekutif. yang dalam tingkatan ini adalah undang-undang peraturan pemerintah, juga keputusan serta Instruksi Presiden
3. Tingkatan kebijakan khusus
Dalam tingkatan ini yang berwenang adalah menteri sebagai pembantu presiden. Menteri membuat kebijakan ini berdasarkan kebijakan yang berada di atasnya atau eksekutif. Termasuk dalam tingkatan ini adalah keputusan menteri dan instruksi menteri. Adapun sekretaris jenderal dan Inspektur Jenderal adalah pembantu menteri dan kebijakan mereka bisa dikategorikan sebagai kebijakan khusus
4. Tingkatan kebijakan teknis
Ini merupakan kebijakan operatif karena akan menjadi pedoman pelaksanaan. Sedangkan yang berwenang di level ini adalah pejabat yang ada di eselon 2 ke bawah mulai Direktorat Jenderal, Pimpinan lembaga non departemen, Kebijakan dalam level ini adalah peraturan keputusan serta instruksi Pimpinan lembaga pendidikan.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Empat faktor yang ikut mempengaruhi implementasi dalam kebijakan dan korelasi antara satu dengan yang lain.¹⁶

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan karena dengan komunikasi sebuah kebijakan akan tersampaikan dengan kepada masyarakat atau lembaga.

2. Sumber daya

kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas akan tetapi jika sumber daya kurang baik maka implementasi juga tidak akan bisa berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dimaksud di sini bisa berupa manusia dan sumber daya financial.

3. Disposisi

Disposisi artinya seorang implementator hendaknya memiliki kejujuran dan

komitmen. Hal ini juga sangat berpengaruh karena keberhasilan sebuah implementasi kebijakan sangat tergantung pada implementatornya.

4. Struktur birokrasi

Di antara aspek penting dalam hal struktur birokrasi adalah adanya, SOP (*Standard Operating Procedures*) Yang dijadikan pedoman bagi setiap implementator dalam menjalankan pekerjaan.

Sejarah kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia

Periode sebelum kemerdekaan

Periode ini dimulai sejak datangnya orang-orang Eropa. Pada masa ini kebijakan kurikulum ditujukan untuk penyebaran agama dan juga mempermudah jalur perdagangan di Indonesia. Maka pada masa itu berdirilah lembaga pendidikan sebagai upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia yaitu sekitar abad 16 dan 17.¹⁷

Sedangkan pada periode penjajahan Jepang terjadi perubahan yang signifikan yakni runtuhnya sistem pemerintahan kolonial Belanda dan pada saat itu tujuan kebijakan pendidikan lebih berfokus untuk tujuan perang. Maka pada masa tersebut muncul sekolah rakyat atau *kokumin gako* yang dilaksanakan selama 6 tahun.

Pada awal masa masa kemerdekaan, kondisi pendidikan di Indonesia kualitasnya masih memprihatinkan. Hasil studi kemampuan membaca tingkat SD yang dilakukan oleh *International Education achievement* bahwa siswa SD di Indonesia menempati urutan ke-38 dari 39 negara. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Indonesia menempati posisi urutan urutan ke 39 dari 42 negara peserta.

Dari Hasil studi tersebut tergambar bahwa kondisi pendidikan di Indonesia begitu buruk.

¹⁷ Fitri Wahyuni, 'Kurikulum Dari Masa Ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia)', *Al-Adabiya*, 10.2 (2015), 231-42
<<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/alabadiyah/article/view/2792>>.

¹⁶ Ibid

Hal ini didasarkan pada tiga faktor.¹⁸ Yang pertama adalah pada saat itu kebijakan pendidikan nasional menggunakan *educational production function* akan tetapi pelaksanaannya tidak bisa optimal. Perlu diketahui bahwasanya pendekatan ini menempatkan pendidikan sebagai pusat produksi yang diharapkan hasilnya nanti bisa memenuhi kegiatan sesuai outputnya. Penyebab kedua kebijakan penyelenggaraan pendidikan menggunakan teori birokratik sentralistik yang menjadikan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan itu tergantung terhadap keputusan-keputusan birokrasi yang ruwet dan berliku-liku. Penyebab ketiga adalah peran dari masyarakat yang masih sangat minim khususnya orang tua atau wali siswa. Peran masyarakat pada waktu itu lebih lebih bersifat sebagai pendukung pendanaan dan tidak berpartisipasi dalam proses pendidikan.

Periode Setelah Kemerdekaan

a. Kurikulum 1947

Ini adalah kurikulum pertama pada periode kemerdekaan dengan rencana pelajaran 1947 Pancasila menjadi dalam pendidikan karena situasi akibat Perang revolusi kurikulum ini baru bisa di terapkan tahun 1950 itupun programnya masih sangat sederhana. Hanya terdiri dari program mata pelajaran garis-garis besar serta pengajaran dan jam pengajarannya. Kurikulum 1947 ini menekankan pada pendidikan watak dan juga kesadaran bernegara dan tidak menekankan pada pendidikan pikiran dalam kurikulum ini mata pelajaran ada 16 materi untuk tingkat sekolah rakyat dan untuk daerah Jawa Sunda dan Madura ditambah dengan materi pelajaran bahasa daerah pada umumnya materi pelajaran berhubungan dengan kejadian sehari-hari kesenian dan pendidikan jasmani pada periode ini dibentuk juga kelas

masyarakat yang merupakan kelas khusus bagi siswa lulusan sekolah rakyat yang pada masa lalu tidak melanjutkan ke SMP masuk dalam kelas masyarakat ini yang perlu dipelajari adalah refleksi atau tampilan, missal bidang pertukangan pertania dan yang lainya.¹⁹

b. Kurikulum 1952

Kurikulum pada masa ini disebut juga dengan istilah rencana pelajaran yang teruraipada tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengalami penyempurnaan atas kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1947 atau rencana pelajaran 1947. Kurikulum ini pun sudah menekankan sistem pendidikan nasional. Kurikulum ini mempunyai beberapa ciri bahwa dalam setiap perencanaan pelajaran lebih ditekankan pada perhatian dari isi dan mutu pelajaran yang memiliki hubungan dengan kehidupan di masyarakat sehari-hari.

c. Kurikulum 1964

Pada akhir periode Presiden Soekarno, dibentuk kurikulum 1964. Kurikulum ini disebut juga dengan rencana pendidikan 1964 dan sudah mengalami penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai 1952 Pada kurikulum ini mata pelajaran dalam 5 bidang studi yaitu moral, kecerdasan, rasional atau artistic, keterampilan dan jasmani. Disektor dalam pendidikan dasar yang ditekankan adalah pengetahuan dan kegiatan fungsional, praktis. Kurikulum ini mempunyai ciri khas yaitu pemerintah berkeinginan agar masyarakat atau rakyat mendapatkan pengetahuan akademik secara maksimal. Maka dari itu program pendidikan dipusatkan pada sebuah program yang diberi nama Panca Wardana, isinya adalah pengembangan daya cipta rasa karya dan moral.

d. Kurikulum 1968

Pada tahun 1968 muncul lagi kurikulum baru yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini menyempurnakan kurikulum sebelumnya

¹⁸ Maryatul Kiptiyah, Sukarno, and Minna El Widdah, 'Sejarah Perkembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Indonesia (Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam)', *Literasiologi*, 6.2 (2021), 41–64.

¹⁹ Wahyuni.

yaitu kurikulum 1964. kurikulum ini terdapat perubahan struktur dari Panca Wardana kemudian menjadi pembinaan jiwa Pancasila, sebagai pengetahuan dasar serta kecakapan khusus. kurikulum 1968 ini pada dasarnya menjadi pijakan dalam mewujudkan pelaksanaan UUD 1945 secara murni, dan konsekuen. Kurikulum ini memiliki tujuan pendidikan dengan lebih menekankan upaya pembentukan manusia yang Pancasila, kuat dan juga sehat jasmani dan rohani, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, berbudi pekerti dan juga memiliki keyakinan beragama yang tinggi.

e. Kurikulum 1975

Pada tahun ini juga muncul kurikulum baru menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini juga diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Yang mendasari kurikulum ini adalah konsep MBO atau *manajemen by objective*. Kurikulum Pada periode ini sering dikenal dengan istilah kurikulum satuan pelajaran, maksudnya pelajaran untuk tiap satuan pembahasan. Pada tiap satuan pelajaran tersebut diberikan rincian lagi berupa petunjuk umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar dan juga evaluasi. Akan tetapi dalam perjalanannya kebijakan kurikulum ini mendapat banyak kritikan. Alasannya adalah guru menjadi sibuk untuk menulis rincian-rincian terhadap capaian-capaian dari kegiatan pembelajaran.

f. Kurikulum 1984 (CBSA)

Setelah kurikulum 1975 muncul kurikulum baru yaitu kurikulum 1984 atau kurikulum CBSA dan lebih sering disebut dengan "kurikulum 1975 yang disempurnakan". Kurikulum ini menekankan pada prinsip *process skill approach*. Program kurikulum ini memposisikan siswa sebagai subjek belajar dimulai dari proses mengamati, mendiskusikan, mengelompokkan kemudian melaporkan. Ciri khas kurikulum ini sering disebut dengan cara

belajar siswa aktif (CBSA) atau *student active learning*. Para pembuat kebijakan mempertimbangkan bahwa waktu belajar siswa dalam sekolah sangat terbatas oleh karena itu harus bisa fungsional dan efektif.

g. Kurikulum 1994

Kurikulum 1984 telah mengalami penyempurnaan lagi yaitu dalam bentuk kurikulum 1994, atas dasar undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sisdiknas. Dampak yang jelas dari kurikulum 1994 ini adalah berubahnya sistem waktu pelajaran yang sebelumnya menggunakan sistem semester menjadi sistem caturwulan. Dengan sistem ini waktu pelajaran dibagi tiga tahap dalam satu tahun dengan tujuan agar siswa mendapatkan lebih banyak pelajaran. Inti dari kurikulum ini menekankan pemahaman konsep dan juga keterampilan untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah.

h. Kurikulum 2004 (KBK)

Kurikulum ini disebut juga dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang menekankan pengembangan kemampuan siswa menyelesaikan kompetensi atau tugas-tugas yang sudah diatur standar performanya. Orientasi dari kurikulum 2004 ini yang pertama adalah hasil atau dampak yang diperoleh para siswa dengan menjalani serangkaian pembelajaran, dan yang kedua dalam bentuk keberagaman baik secara individu secara klasikal dan dimanifestasikan relevan dengan kebutuhan siswa.

i. Kurikulum 2006

Kurikulum 2006 ini menggantikan kurikulum sebelumnya dan lebih dikenal dengan istilah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau dari dilihat dari isi dan proses pencapaian target sampai pada tataran teknis evaluasi, sebenarnya tidak ada banyak perbedaan dengan kurikulum sebelumnya. Adapun perbedaan yang kentara adalah kebebasan yang diberikan kepada guru dalam membuat perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah itu sendiri. Hal ini dikarenakan KD atau

kerangka dasar, SKL atau standar kompetensi lulusan, SKKD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar, sudah ditetapkan oleh Depdiknas. Oleh karena itu Silabus dan sistem penilaian adalah kewenangan sekolah atau satuan pendidikan, akan tetapi tetap dibawah koordinasi dan pengawasan Pemkab atau Pemkot.

j. Kurikulum 2013

Pada tahun 2013 muncul lagi kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan langkah lanjutan dari kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum ini menitikberatkan pada program pembelajaran yang mendorong siswa agar lebih baik atau lebih mumpuni dalam mengerjakan observasi, bernalar, bertanya dan juga mempresentasikan hasil yang sudah diperoleh. Objek dan sasaran dari kurikulum ini lebih ditekankan gejala-gejala dan fenomena alam, sosial, seni serta budaya yang ada.

Tabel. 1

Tabel perubahan kurikulum dari waktu ke waktu

Tahun	Istilah kurikulum	Keterangan
1947	Rencana pelajaran 1947	menekankan pada pendidikan watak dan juga kesadaran bernegara
1952	Rencana pelajaran terurai 1952	Apersepsi tertuju pada isi pelajaran yang ada hubungannya dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari
1964	Rencana pendidikan 1964	Program Panca Wardana, yang berisi pengembangan daya cipta, rasa, karya serta moral
1968	Pembaharuan	membentuk manusia Pancasila yang sejati,

	kurikulum 1964	yang memiliki kekuatan, sehat jasmani, mampu serta meningkatkan kecerdasan dan keterampilan jasmani, dan budi pekerti dan selalu menjaga keyakinan beragama
1975	Kurikulum berorientasi pencapaian	Berkonsep MBO atau <i>manajemen by objective</i>
1984	Kurikulum cara belajar siswa aktif (CBSA)	menempatkan anak didik sebagai subjek pembelajaran dimulai dari proses kegiatan mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, juga membuat pelaporan yang diakhiri dengan refleksi
1994	Pembaharuan kurikulum 1984	Menekankan pada pemahaman konsep, juga keterampilan guna menjadi solusi dalam memecahkan masalah
2004	Kurikulum berbasis kompetensi (KBK)	menekankan pengembangan kemampuan siswa menyelesaikan kompetensi atau tugas-tugas yang sudah diatur standar performanya
2006	Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)	kebebasan yang diberikan kepada guru dalam membuat perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah
2013	Kurikulum 2013 orientasi pada pendekatan Tematik	Siswa didorong untuk lebih aktif dalam pengembangan sumber pengetahuan dan melakukan

	Integratif dan Saintifik	pembelajaran melalui pendekatan saintifik, <i>problem based learning</i> dan <i>project based learning</i> serta investigation, dengan evaluasi penilaian mencakup tiga aspek: <i>knowledge</i> , ketrampilan, <i>attitude</i> .
--	--------------------------	--

Kebijakan pemerintah terhadap kurikulum pendidikan Islam

Periode Sebelum Kemerdekaan

Realisasi antara rumusan tujuan pembelajaran nasional dan rumusan tujuan pembelajaran Islam ada hubungan dan keterkaitan. Dalam rumusan tujuan pendidikan nasional dikatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa meningkatkan pribadi yang ada menjadi manusia sempurna dan seutuhnya. Dan dalam hal ini, manusia sempurna dan seutuhnya bisa diartikan dengan manusia yang mempunyai iman dan taqwa serta berbudi pekerti luhur, berketerampilan dan pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, berpribadi mantap dan bertanggung jawab.

Seperti diketahui bahwa perumus dan penentu kebijakan adalah pemerintah, dalam hal ini adalah presiden wakil presiden dan anggota dewan, yang terpilih secara konstitusi. Maka profil dari personalia yang menempati posisi jabatan-jabatan tersebut nanti yang akan menentukan. Baik dan buruk, serta gelap dan terangnya perjalanan bangsa ini tergantung dari pemerintahnya. Maka, sungguh sangat relevan ungkapan berikut ini: "*busuknya ikan dimulai dari kepalanya*".

Umat Islam di Indonesia merupakan umat mayoritas. Maka seyogianya seluruh umat Islam memikirkan pentingnya mempelajari ilmu politik, dan juga memanfaatkan ilmu politik sebagai salah satu implementasi dari ajaran agamanya dan juga sebagai salah satu jalan dalam menyelamatkan dan mengangkat kepentingan-kepentingan umat Islam itu

sendiri, terutama dalam bidang pendidikan serta kegiatan belajar mengajar.

Pendidikan Islam juga harus berusaha menjadikan anak didiknya manusia seutuhnya, jasmani dengan rohaninya, hati dengan akalunya, dan juga akhlak dengan keterampilannya. Pendidikan Islam harus bisa berperan menjadi suplemen untuk Hari Pendidikan Nasional. Apabila hal ini bisa terwujud, Apakah sistem pendidikan nasional akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, modern, yang berlandaskan iman dan taqwa.

Pada masa ini, Belanda mempunyai ketakutan akan kebangkitan umat Islam, maka pendidikan Islam saat itu begitu didiskriminasi, bahkan sampai mengeluarkan peraturan bahwa para pengajar di Madrasah atau Pesantren harus memiliki izin dari pemerintah.²⁰ Madrasah sebagai sebuah lembaga mengalami Perjalanan yang sangat panjang bahkan dari era sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam era tersebut pendidikan Islam sudah eksis dan diselenggarakan di surau, masjid, pesantren dan lain sebagainya. Kemudian perlahan mengalami perubahan demi perubahan menjadi lebih terstruktur dan terorganisir sehingga lahirlah madrasah.²¹

Pada masa ini kondisi pendidikan nasional di Indonesia masih bercorak sekuler. Dimana materi pelajaran agama tidak dimasukkan dalam materi kegiatan pembelajaran, maka Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) mengeluarkan usulan: "*hendaknya diadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat atau mengintegrasikan kedua sistem pendidikan warisan budaya bangsa tersebut*", dengan memasukkan materi pelajaran agama.²²

²⁰ Muhammad Sholeh Hoddin, 'Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.', *Jurnal Ilmiah Iqra*, 14.1 (2020), 15 <<https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>>.

²¹ Wahyuni.

²² Maryatul Kiptiyah, Sukarno, and Minna El Widdah.

Periode Setelah Kemerdekaan

Pada era ini dibentuk Departemen Agama yang menangani seluk-beluk dan masalah agama di Indonesia termasuk bidang pendidikan, dalam hal ini madrasah. Akan tetapi, pada masa ini fungsi dari Departemen Agama terhadap madrasah hanya dalam hal pembinaan dan pengawasan sampai pada selanjutnya muncul SKB 3 menteri.²³

Pada Masa SKB 3 Menteri

Tahun 1975 tiga Kementerian yaitu Menteri Agama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan yaitu SKB 3 menteri nomor 6 tahun 1975 dan nomor 037/U/ 1975. SKB 3 menteri ini menitikberatkan pada pengembalian pendidikan Islam agar bisa disejajarkan dengan Pendidikan Nasional atau sekolah umum dengan melakukan pembinaan dan pembaharuan, kurikulum secara menyeluruh. SKB tersebut menetapkan bahwa bahwa Madrasah adalah merupakan lembaga pendidikan dimana pelajaran agama Islam dijadikan sebagai mata pelajaran dasar sekurang-kurangnya 30% dari seluruh mata pelajaran.

Dalam Surat Keputusan Bersama ini juga ditetapkan bahwa ijazah madrasah juga memiliki nilai yang setara dengan ijazah sekolah umum, dan yang setingkat dengannya, sedangkan siswa lulusan dari madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang tingkatannya lebih tinggi, juga mutasi siswa dari madrasah bisa pindah ke sekolah umum yang setingkatnya sama.

Pada Masa Pasca UU No. 20/2003 dan UU No. 2 Tahun 1989

Sedikit ada Terdapat perbedaan tentang undang-undang nomor 2/1989 dengan undang-undang sebelumnya. Karena undang-undang ini menjelaskan tentang semua jalur dan jenis pendidikan yang mencakup jalur sekolah dan luar sekolah, dan juga mencakup jenis-jenis pendidikan akademik, pendidikan

professional, pendidikan agama dan pendidikan kejuruan.

lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, sebagai pemicu munculnya beberapa peraturan pemerintah tentang pendidikan, diantaranya :²⁴

- a. PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- b. PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- c. PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- d. PP No. 30 Tahun 1990 yang kemudian disempurnakan dengan PP. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan undang-undang nomor 20/2003 dijelaskan bahwa fungsi dari pendidikan nasional adalah pengembangan kemampuan juga pembentukan karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Hal ini perlu menjadi sebuah ketetapan peserta didik dapat menjadi manusia yang beriman serta bertakwa, dan berakhlak mulia, berilmu, kreatif, menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab, tentu saja melalui beberapa alternatif, salah satunya adalah pendidikan becorakkan agama Islam.

Pendidikan agama Islam dalam hal ini bisa berbentuk Madrasah Diniyah dan pesantren. Madrasah Diniyah juga dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah sangatlah fariatif, adakalanya berbentuk non formal bisa berbentuk Majelis Taklim, Pendidikan Alquran, Diniyah Takmiliah, Pengajian Kitab dan lain-lain.

Pada waktu undang-undang tentang Sisdiknas diterapkan, pengakuan akan eksistensi Madrasah semakin meningkat.²⁵

Politik di suatu Negara tentu akan memberikan pengaruh dalam setiap sendi kehidupan bangsanya, termasuk bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan pemerintah berperan sebagai perumus kebijakan.²⁶

²⁴ Dr. Umar Sidiq and Wiwin Widyawati.

²⁵ Dr. Umar Sidiq and Wiwin Widyawati.

²⁶ Baderun, 'Politik Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Kajian Historis Kurikulum)', *Jurnal Dinamika Penelitian: Media*

²³ Wahyuni.

Kalau merunut dari sejarah di atas yaitu terjadinya perubahan kurikulum berkali-kali Hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem sosial budaya ekonomi iptek secara cepat, termasuk di dalamnya adalah politik.²⁷ Perubahan memang merupakan sebuah keharusan untuk menjawab tantangan zaman yang juga terus berubah. Muhajir menyebut hal ini dengan istilah “pergeseran”.²⁸ Dimana pergeseran (perubahan) ini sebenarnya terjadi di semua negara, tidak hanya Indonesia. Zazkia dan Hamami menyebutnya dengan perubahan seiring bergantinya menteri.²⁹ Sementara Bahri dalam menyikapi perubahan-perubahan kurikulum ini mengistilahkan dengan rekonstruksi dan inovasi atas kurikulum sebelumnya.³⁰ Beda lagi dengan Abdullah, yang mengomentari perubahan ini dengan sebutan perombakan kebijakan, meski pemerintah mengistilahkan dengan penyempurnaan.³¹ Paparan dari tokoh-tokoh tersebut sebenarnya bermuara pada 1 pokok pikiran, yaitu bagaimana perubahan politik, sosial dan

budaya, serta kebijakan dari pemegang kekuasaan akan menentukan warna dan corak dari pendidikan.

Pendidikan Islam Era transformatif

Tantangan terkini adalah bentuk respons terhadap situasi bencana Covid-19 yang berkembang beserta semua dampaknya dalam problematika pendidikan Islam. esensi pendidikan Islam adalah upaya membangun SDM yang memiliki karakter berpendidikan dengan nilai yang Islamis serta mengedepankan akhlakul karimah atau budi pekerti yang mulia. sayangnya, terkait dengan realisasi langsung dan perilaku serta keteladanan yang dibangun bersama antara pendidik dan anak didik. Jika tidak ditemukan solusi yang efektif, situasi ini akan menghadapi risiko yang berkepanjangan, *loss generation* dalam konteks pengembangan karakter pendidikan Islam.³²

Target kompetensi guru Pendidikan Islam dalam hal ini adalah madrasah, pada masa perkembangannya kini dihapkan dengan sebuah metode pembelajaran berbasis Teknologi, teknologi sangat pesat melebihi ekspektasi manusia. termasuk adanya peran-peran manusia yang sebagian sudah digantikan kehadiran oleh robot cerdas mendegradasi peran manusia, Melalui Revolusi Society 5.0 Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Dapat Mentransformasi Big Data (*Solutions For Better Human Life*) pada segala Sendi Kehidupan serta *The Internet Of Things* Kearifan Baru. Dapat Didedikasikan Untuk Meningkatkan Kemampuan Manusia Membuka Peluang Baru termasuk dalam pengelolaan Keuangan, latar belakang entering society 5.0, Entering Society 5.0 Dapat Diartikan Sebagai Suatu Konsep Masyarakat yang Berpusat pada Manusia (Human Interest) dan Berbasis Teknologi (Technology Based) Gambaran Revolusi 5.0 *cognitive system era revolusi 4.0* manusia masih dibutuhkan untuk memperbaiki perangkat (*hardware*) yang rusak.

Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan, 18.1 (2018), 67–88 <<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1272>>.

²⁷ Maimuna Ritonga, ‘Politik Dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi’, *Bina Gogik*, 5.2 (2018), 88–102.

²⁸ Muhajir, ‘Pergeseran Kurikulum (Anallisis Pemikiran Para Ahli Pendidikan)’, *Qathruna*, 3.2 (2016), 15–48.

²⁹ Shelly Alvareza Zazkia and Tasman Hamami, ‘Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Tengah Dinamika Politik Pendidikan Di Indonesia’, *At-Ta’Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 13.1 (2021), 82 <<https://doi.org/10.47498/tadib.v13i01.524>>.

³⁰ Syamsul Bahri, ‘Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuannya’, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11.1 (2017), 15 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.61>>.

³¹ Anzar Abdullah, ‘Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Sepanjang Sejarah’, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 13.066 (2007), 343 <<file:///C:/Users/ACER/Downloads/354-Article Text-1134-1-10-20160929.pdf>>.

³² <https://kemenag.go.id/read/menju-pendidikan-islam-transformatif-refleksi-dan-proyeksi-arah-pendidikan-islam-v3v5n>

revolusi industri 5.0, perangkat sudah otomatis mampu memperbaiki dirinya sendiri, human intelligence manusia dan mesin akan bekerja sama (*kolaboratif*) dalam Memecahkan Masalah, . *Remote Prduction* Di Era Revolusi 5.0, Manusia akan Terbiasa Membuat Kreasi Lewat Printer Tiga Dimensi *Take Over Of Artificial Intelligence* Versi Ini Mungkin agak Sensi Dimana Robot Menjadi Ancaman Bagi Manusia, Big Data Untuk Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Entering Society 5.0, Pengawas, Komite) Integritas, kapasitas, kompetensi, komitmen dan loyalitas, (Siswa, Guru, Kamad, Pengawas, Komite) Integritas, kapasitas, kompetensi, komitmen dan loyalitas, pemimpin profesional dan bermartabat meningkatkan mutu madrasah.³³

Kesimpulan

1. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang dihasilkan dari perilaku para pengambil keputusan dalam sebuah organisasi atau lembaga mengenai aktifitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana dalam mencapai sebuah tujuan. Sementara kurikulum adalah seperangkat program pendidikan dan rencana pengaturan pendidikan yang dibuat oleh sebuah institusi pendidikan atau lembaga negara yang digunakan sebagai pedoman bagi sebuah lembaga dalam menjalankan proses belajar mengajar.
2. Perjalanan kurikulum sempat mengalami beberapa kali perubahan, bahkan sejak Indonesia merdeka. Kurikulum pertama kali adalah kurikulum tahun 1947, lalu diperbarui dengan kurikulum tahun 1952, lalu diperbarui lagi dengan kurikulum tahun 1964, kemudian disempurnakan dengan kurikulum tahun 1968, kemudian disempurnakan lagi dengan kurikulum 1975, kemudian disempurnakan lagi dengan kurikulum 1984 atau CBSA, kemudian disempurnakan lagi dengan kurikulum tahun 1994, kemudian disempurnakan lagi dengan kurikulum 2004 atau KBK, kemudian disempurnakan

lagi dengan kurikulum 2006 atau KTSP, dan terakhir diperbaharui dengan kurikulum tahun 2013. Perubahan-perubahan (pembaruan dan penyempurnaan) ini merupakan imbas dari beberapa hal, diantaranya adalah perubahan sosial budaya perubahan atau perkembangan teknologi dan perubahan konstelasi politik di tanah air.

3. Dari semua pemaparan diatas, bisa dipahami bahwa politik begitu memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah pendidikan. Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Sebagaimana kita tahu bahwa Pemilihan presiden serta anggota DPR dilakukan dalam setiap 5 tahun sekali. Maka bisa diartikan bahwa dalam setiap 5 tahun terjadi perubahan konstelasi politik, dan kebijakan politik pun juga akan ikut berubah. Perubahan ini membawa dampak besar dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya adalah sosial ekonomi budaya dan juga pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Taufik, 'Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam', *EL-Ghiroh*, 17.02 (2019), 81-102
<<https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v17i02.106>>.
- Anwar H.Mohammad Emnis, 'Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia', *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 03.Januari (2014), 483-96.
- Anzar Abdullah, 'Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Sepanjang Sejarah', *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 13.066 (2007), 343
<[file:///C:/Users/ACER/Downloads/354-Article Text-1134-1-10-20160929.pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/354-Article%20Text-1134-1-10-20160929.pdf)>.
- Baderun, 'Politik Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Kajian Historis Kurikulum)', *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 18.1 (2018), 67-88
<<http://ejournal.iain->

- tulungagung.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1272>.
- Dr. Umar Sidiq and Wiwin Widyawati. 2
- Fitri Wahyuni, 'Kurikulum Dari Masa Ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia)', *Al-Adabiya*, 10.2 (2015), 231-42 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/alabadiyah/article/view/2792>>.
- Hermawan, Juliani, and Widodo, 69
<http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/menyiapkan-pendidik-profesional-di-era-society-50>
<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/23/kebijakan-pendidikan-nasional-quo-vadis>
<https://kemenag.go.id/read/menju-pendidikan-islam-transformatif-refleksi-dan-proyeksi-arah-pendidikan-islam-v3v5n>
<https://www.google.com/search?q=kebijakan+privat&oq=kebijakan+privat&aqs=chrome..69i57j0i512l9.1759j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Mufarrihul Hazin and Nur Wedia Devi Rahmawati, 'Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Studi Histori Dan Regulasi Di Indonesia)', *Journal EVALUASI*, 5.2 (2021), 293 <<https://doi.org/10.32478/evaluasi.v5i2.745>>.
- Muhajir, 'Pergeseran Kurikulum (Anallisis Pemikiran Para Ahli Pendidikan)', *Qathruna*, 3.2 (2016), 15-48.
- Muhammad Irsad, 'Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah (Studi Atas Pemikiran Muhaimin)', 2.1 (2016), 230-68.
- Muhammad Sholeh Hoddin, 'Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.', *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14.1 (2020), 15 <<https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>>.
- Rachmad Sobri, 'Politik Dan Kebijakan Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Di Indonesia (Analisis Kebijakan PP No 55 Tahun 2007)', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.01 (2019), 109 <<https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.322>>.
- Shelly Alvareza Zazkia and Tasman Hamami, 'Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Tengah Dinamika Politik Pendidikan Di Indonesia', *At-Ta'Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 13.1 (2021), 82 <<https://doi.org/10.47498/tadib.v13i01.524>>.
- Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Malang: UPT Penerbitan UMM, 2011), hlm. 16.
- Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: UPT UMM Malang, 2011), hlm. 45
- Syamsul Bahri, 'Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuannya', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11.1 (2017), 15 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.61>>.
- Umar Sidiq and M.Pd Wiwin Widyawati, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*, ed. by M.Ag Dr. Ahmad Choirul Rofiq, 1st edn (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019).
- Yudi ^{Candra} Hermawan, Wikanti Iffah Juliani, and Hendro Widodo, 'Konsep Kurikulum Dan Kurikulum Pendidikan Islam', *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10.1 (2020), 34 <<https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.4720>>.